



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titik Setiawati

Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Jawa Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 06 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Jawa Timur

Titik Setiawati  
NIP. 197102181994032001

| Kegiatan                                                                                | Anggaran                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Program Pembentukan Regulasi</b>                                                     | <b>Rp. 769.941.000,-</b>   |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah                              | Rp. 623.000.000,-          |
| Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | Rp. 146.941.000,-          |
| <b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>                                            | <b>Rp. 7.158.113.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah                                              | Rp. 7.158.113.000,-        |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                       | <b>Rp. 508.797.000,-</b>   |
| Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah                                            | Rp. 508.797.000,-          |

Surabaya, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur



Haris Sukanto  
NIP.196606051989111001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Jawa Timur



Titik Setiawati  
NIP.197102181994032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titik Setiawati  
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum  
Kantor Wilayah Jawa Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Haris Sukamto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur

Haris Sukamto  
NIP.196606051989111001

Pihak Pertama,  
Kepala Divisi Peraturan Perundang-  
undangan dan Pembinaan Hukum  
Jawa Timur

Titik Setiawati  
NIP. 197102181994032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM HUKUM**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                  | Target    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                                                         | (4)       |
| 1.  | Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah                                                       | Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum                                         | 80 %      |
| 2.  | Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan                                           | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan                                                        | 29 Orang  |
| 3.  | Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah | 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan                                                                                 | 1 Dokumen |
|     |                                                                                                         | 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah                                                                                           | 1 Dokumen |
| 4.  | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah                                                    | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah                                                              | 25 %      |
| 5.  | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah                                                           | 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi                        | 82 %      |
|     |                                                                                                         | 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi                | 80 %      |
| 6.  | Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah                                                                | Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah | 70 %      |
| 7.  | Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah                                 | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti                                                             | 80 %      |